



Kelola Keuangan Lebih Baik

Pemkab Jalin Kerjasama Dengan Kanwil DJPb

SINTANG-Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan perjanjian kerjasama dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, pada Selasa (22/2), di Pendopo Bupati Sintang.

Perjanjian kerjasama yang berlaku selama 5 tahun tersebut menyangkut kerjasama peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Bupati Sintang, Jarot Winarno mengatakan, sebenarnya kerjasama antara Pemkab Sintang dengan jajaran Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat selama ini sudah akrab dan baik, tetapi dengan adanya perjanjian kerjasama ini, maka kedepan kerjasama akan lebih baik lagi.

"Dengan kerjasama ini, jajaran Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat akan bertindak sebagai konsultan dan menjadi tempat jajaran Pemkab Sintang untuk berkoordinasi semua hal seperti perencanaan, pagu dana, realisasi anggaran dan semua yang berkaitan dengan dana

pemerintah terutama dana alokasi khusus, anggaran dana desa dan anggaran lain,"ucap Bupati.

Jarot juga meminta arahan kepada jajaran Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat soal pengelolaan dana dan anggaran, serta hal yang lainnya yang bisa meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran negara di Pemkab Sintang.

"Kepada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dapat memanfaatkan perjanjian kerjasama ini sebaik-baiknya," katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat,

Imik Eko Putro, menyampaikan pembangunan di Sintang ini sangat maju dan ada kebijakan untuk mengerem pemberian ijin perkebunan karena berusaha mewujudkan pembangunan berawasan lingkungan.

"Kesehatan dan pendidikan bagus. Semua indikator makro bagus. Kerjasama ini merupakan arahan pimpinan kami di Kementerian Keuangan untuk memban-



PROKOPIM FOR PONTIANAK POST

KERJASAMA: Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan perjanjian kerjasama dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, pada Selasa (22/2), di Pendopo Bupati Sintang.

gun komunikasi dengan pemerintah daerah tentang peranan instansi kami, dan bisa memberikan manfaat yang baik bagi daerah. Kalau tugas dan fungsi kami, tanpa ada MoU, kami wajib menyalurkan dana dari pusat ke daerah," terang Imik Eko Putro.

Ia menuturkan, dengan adanya MoU ini, ada ruang untuk bisa diolah dalam rangka mengoptimalkan kinerja pengelolaan anggaran di daerah. Menurutnya, ruang yang ada itu harus dibuka, misalnya ada dina-

mika dalam penyaluran DAK dan dana desa yang harus dipahami KPPN dan OPD terkait.

Dengan MoU ini, diskusi dan konsultasi akan semakin nyaman dan terbuka. Ia mengungkapkan, realisasi belanja di Sintang sudah bagus. Dana desa memerlukan perhatian khusus dan harus dipahami. Dan pihaknya berharap penyaluran dana desa bisa lancar dan bisa sampai ke masyarakat di pedesaan.

"Penyaluran KUR di Sintang tahun 2021 sebesar 329 miliar. Penyaluran kredit un-

tuk ultra mikro juga naik tahun 2021 mencapai 2 milyar. Selain realisasi anggaran, kita juga mengejar kualitas pelaksanaan anggaran yang dimonitor oleh BPK dan Sintang sudah mendapatkan WTP sejak 2015 dari BPK Kalbar. Saya berharap MoU tidak hanya seremonial, ini pekerjaan berikutnya panjang. Kami akan monitor setiap 3 bulan. Penyerapan anggaran minimal 18 persen di triwulan I, triwulan II harus 45 persen, triwulan III harus 70 persen dan triwulan IV minimal 97 persen,"pungkasnya. (var)